

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pemerintah dalam penerapan model pemerintahan secara otonomi membuat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap setiap kemajuan dan perkembangan wilayahnya. Dengan adanya model pemerintahan otonomi berdampak pada perubahan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pemanfaatan pengelolaan sumber daya hingga pengelolaan keuangan daerah. Segala bentuk upaya pemerintahan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada tidak lain adalah sebagai tujuan tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good governance dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik (Moento et al., 2019). Keberhasilan pemerintah dalam penerapan good governance dalam sistem otonomi diukur dari kematangan persiapan dan kemampuan pemerintah daerah dalam mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. Secara teori good governance menekankan pada proses pengelolaan pemerintah dengan adanya stakeholders yang terlibat dalam bidang sosial, ekonomi dan juga politik serta juga ikut terlibat dalam mendayagunakan sumber daya yang ada meliputi alam dan manusia ataupun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing (Dhiyavani, 2012).

Good governance penting dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas pelayanan birokrasi pada masyarakat dalam penggunaan kekuasaan dan otoritas serta sebagai bentuk penyelesaian berbagai persoalan politik (RUSPINA, 2013). Dilihat dari prinsip tercapainya, good governance juga menjadi sangat penting karena dampaknya yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi daerah (Zuhro, 2010). Dalam studi yang dilakukan (Zuhro, 2010) juga menjelaskan bahwa good governance diciptakan sebagai alat

dihapuskannya korupsi kolusi dan nepotisme dalam birokrasi sehingga tugas tugas pemerintah pusat dan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Peran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat sebagai syarat tercapainya good governance tentunya berkaitan dengan kinerja aparatur daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Disampaikan oleh (RUSPINA, 2013) yang dikutip dari (Wardani, 2010) bahwa indikasi keberhasilan sebuah pemerintahan terletak pada kinerja aparatur pemerintah daerah dalam pencapaian sasaran sesuai dengan visi, misi dan strategi instansi pemerintahan. Sebagai salah satu faktor penting dalam terciptanya good governance, aparatur daerah dituntut untuk merealisasikan kegiatan pelayanan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Namun pada kenyataan di lapangan ditemukan bahwa masih banyak ketidakprofesionalan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dikutip dari data SAPK BKN rekapitulasi disiplin pada instansi daerah yang dijatuhi hukuman disiplin tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8.82% dengan jumlah total kasus sebanyak 2.380 kasus, provinsi Jawa Timur memiliki angka yang cukup tinggi dengan jumlah ASN didisiplinkan sebanyak 394 orang. Untuk kabupaten dan kota Mojokerto menyumbang setidaknya 12 kasus hukuman disiplin (Haryanti, 2019). Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan Good Governance sejalan dengan penelitian terdahulu (RUSPINA, 2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kinerja pemerintah daerah dengan penerapan good governance. Yang berarti semakin baik kinerja pemerintah daerah, semakin baik pula penerapan good governance. Berlainan dengan penelitian oleh (Naura, 2019) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan pengaruh antara kinerja aparatur daerah dengan good governance.

Selain pengelolaan sumber daya melalui aparatur daerah pemerintah juga berperan penting dalam terciptanya pemerintahan yang transparan. Diungkapkan (Addink, 2019) dalam bukunya yang berjudul “Good Governance :Concept and Context” menyatakan bahwa demokrasi memberikan aturan hukum yang mendalam terutama menyangkut transparansi dan partisipasi warga negara terutama akuntabilitas dan efisiensi pemerintah. Dalam perwujudan transparansi pemerintah membutuhkan sebuah sistem dimana yang dikenal sebagai sistem

akuntansi pemerintah daerah . Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai pengelolaan keuangan daerah mulai dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran anggaran pemerintah dengan tujuan dapat mempertanggungjawabkan secara finansial pada pemerintah pusat maupun masyarakat. Peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas pemerintahan dengan cara perbaikan sistem akuntansi sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi, efisiensi serta efektivitas pemerintah daerah, terutama dalam memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah (Mailoor et al., 2017). Kenyataan pelaporan yang seharusnya memiliki standar relevan, handal, dan dapat dipercaya belum dapat terealisasi dengan baik lantaran masih banyaknya kasus fraud yang ditemukan pada SKPD.

Berdasarkan data Transparency International pada tahun 2020, Corruption Perception Index (CPI) yang bersumber dari pada 13 survei global dan penilaian ahli serta para pelaku usaha terkemuka untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara dan teritori. (Penilaian CPI didasarkan pada skor, skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih). “CPI Indonesia tahun 2020 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei” ungkap Wawan Suyatmiko, peneliti Transparency International Indonesia. Hal ini menunjukkan tingkat korupsi sektor publik masih sangat tinggi (Suyatmiko, 2021). Pada tahun 2016 dilaporkan (Sudiono, 2016) sejumlah 10 aparatur pemerintah daerah pada Pemkab Mojokerto dipecat secara tidak hormat karena terbukti melakukan tindak pidana umum, tindak pidana korupsi dan sering bolos.

Disampaikan oleh (Mailoor et al., 2017) dalam penelitian terdahulu bahwa variabel sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif terhadap variabel penerapan good governance pada tingkat keyakinan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa jika sistem dan prosedur yang digunakan sesuai dengan SAP, serta informasi laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik serta didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten dan mampu menggunakan aplikasi SIMDA maka akan terwujud sistem akuntansi pemerintahan yang baik, begitu pula sebaliknya. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Organisasi & Astuti, 2017) , dalam penelitian ini

dinyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara pengelolaan keuangan daerah atau sistem akuntansi keuangan daerah terhadap good governance.

Efektivitas dan akuntabilitas sistem akuntansi daerah tidak lepas dari adanya pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah melalui sebuah sistem sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang disebut sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP). SPI adalah sebuah proses yang dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan suatu pemerintah daerah yang tercermin dari keteladanan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang - undangan (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) (Rohmah et al., 2020). Pentingnya penerapan SPI pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) meliputi beberapa unsur pengendalian diantaranya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Dengan terpenuhi dan berhasil dilaksanakannya kelima unsur pengendalian akan membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan proses pengendalian internal pemerintah dengan baik.

Peran pengendalian internal pada pemerintah daerah dilakukan oleh inspektorat dalam naungan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) BPKRI. Namun sayangnya berdasarkan ikhtisar hasil dari pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah di Indonesia 2016-2018 membuktikan masih banyaknya masalah kelemahan pada pengendalian intern yaitu 6150 kasus tahun 2016, 6.053 kasus pada tahun 2017, dan 6222 kasus pada tahun 2018 (Alawiyah et al., 2020). Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2019 oleh BPKP Provinsi Jawa Timur dari 38 pemerintah kabupaten/kota, terdapat empat daerah yang mencapai tingkat maturasi SPIP level 2 yang salah satunya Pemkab Mojokerto dengan skor 2,9250 dengan status Reviu Rendal hal ini menunjukkan penyelenggaraan SPIP pemerintah daerah masih rendah karena belum dapat mencapai level 3 dalam maturari penyelenggaraan SPIP, dalam penjelasannya hal ini terjadi karena a) Kurangnya kesadaran dan komitmen kepala daerah dalam mengimplementasikan SPIP; b) Penyelenggaraan SPIP masih dianggap sebagai pekerjaan tambahan, bukan sebagai aspek yang melekat dalam seluruh kegiatan Pemerintah Daerah; c) Kurangnya kesadaran akan budaya risiko dari Pemerintah

Daerah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah; d) Terdapat kasus hukum terhadap Kepala Daerah/Kepala Dinas yang kasusnya masih dalam proses APH. Beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan keterkaitan antara SPI dan good governance. (Mailoor et al., 2017) mengungkapkan dari hasil penelitiannya SPIP adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerapan good governance. Namun berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan (RUSPINA, 2013) dan (Dhiyavani, 2012), dalam penelitiannya mereka mengatakan bahwa SPIP tidak berpengaruh pada penerapan good governance.

Dalam teori kinerja aparatur daerah oleh (Wiwik, 2016) dijelaskan bahwa keberhasilan kinerja aparatur daerah merupakan ukuran keberhasilan birokrasi pemerintah dimana hal ini diukur berdasarkan 5 indikator yakni produktivitas, pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Sedangkan pada penerapan sistem akuntansi pemerintah yang dijelaskan oleh (Mailoor et al., 2017) melalui teori stewardship mengatakan sistem akuntansi pemerintah harus dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan membuat pertanggungjawaban laporan keuangan, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal sesuai prinsip good governance. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) dalam Buku Modern Auditing Boynton, dkk yang diterjemahkan oleh Budi (2008) menjelaskan SPIP adalah proses integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah untuk memberikan keyakinan dalam efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai upaya good governance (Astuti et al., 2015). Pentingnya beberapa faktor yang telah dijelaskan mulai dari peningkatan kinerja aparatur daerah, perbaikan sistem akuntansi daerah yang dimiliki serta penyelenggaraan SPIP sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam penerapan good governance tersebut menjadi sebuah sistem yang bermuara pada tingkat kemampuan pemerintah dalam menciptakan birokrasi pemerintahan yang bertanggung jawab. Dimana semakin baik tingkat kinerja, sistem akuntansi pemerintah dan SPIP maka semakin baik pula tata kelola yang dimiliki oleh pemerintah (good governance)

Didukung dari adanya teori dan kesenjangan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh SPIP dalam terwujudnya good governance menjadi alasan peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan Good Governance”

1.2 Rumusan Masalah

Dari ulasan yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya :

1. Apakah kinerja aparatur daerah berpengaruh terhadap penerapan good governance?
2. Apakah sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan good governance?
3. Apakah sistem pengendalian internal (SPIP) berpengaruh terhadap penerapan good governance?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh kinerja aparatur daerah terhadap penerapan good governance
2. Untuk menguji pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap penerapan good governance
3. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal (SPIP) Terhadap penerapan good governance

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis nantinya akan bermanfaat bagi pihak di bawah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah
Dapat menjadi referensi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya mengenai peningkatan kinerja aparatur daerah dan sistem keuangan daerah dalam proses pengendalian internal sehingga nantinya dapat tercapai tujuan pengelolaan pemerintahan yang baik (good government governance).

2. Bagi akademisi

Dapat menjadi referensi pembelajaran mengenai pengaruh yang terjadi pada kinerja aparatur daerah, sistem keuangan daerah dan SPIP terhadap penerapan good governance.

